

Pengaruh demokrasi ekonomi dan derajat penghisapan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam dan daerah non sumber daya alam di Indonesia

Rudy Mas'ud^{1*}, Adi Wijaya², Rachmad Budi Suharto³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

*Email: rahcmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Perwujudan demokrasi ekonomi saat ini makin menjauh dari ideal dimana ketimpangan struktural ekonomi justru kian melebar. Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut maka mengakibatkan angka kemiskinan menjadi tinggi di Indonesia, walaupun ada penurunan dalam setiap tahun, yang ironisnya justru terdapat di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dari pemaparan latar belakang tersebut terlihat bahwa ada permasalahan/problem yang dapat diidentifikasi yaitu bahwa kemiskinan di Indonesia, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) terjadi karena tidak adanya penerapan demokrasi ekonomi yang adil, baik dalam bentuk demokrasi produksi yang rendah, demokrasi pemilikan faktor produksi yang belum optimal, demokrasi alokasi dan konsumsi yang masih pincang dan derajat penghisapan ekonomi yang masif terutama di daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kuantitatif dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 6 dimensi pengukuran yaitu, Demokrasi Ekonomi yang diwakili oleh 3 variabel (Demokrasi Produksi, Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi, Demokrasi Alokasi dan Konsumsi), Derajat Penghisapan Ekonomi, variabel kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2017.

Kata Kunci: Demokrasi ekonomi; derajat penghisapan ekonomi; tingkat kesenjangan; kemiskinan

The influence of economic democracy and the degree of economic exploitation on the level of inequality and poverty in natural resource-producing regions and non-natural resource areas in Indonesia

Abstract

The realization of economic democracy is now increasingly far away from an ideal where economic structural inequality is actually widening. The accumulation of these various problems results in high poverty rates in Indonesia, although there is a decline every year, which is ironically precisely found in areas rich in natural resources. From the background explanation, it can be seen that there are problems / problems that can be identified, namely that poverty in Indonesia, especially in natural resource-producing regions (SDA), occurs because there is no application of fair economic democracy, either in the form of low production democracy, democracy suboptimal ownership of production factors, inefficient allocation and consumption democracy and a degree of massive economic exploitation, especially in natural resource producing regions (SDA). The design used in this study is causal associative research design that is research that intends to describe and test the hypothesis of the relationship of two or more variables. The method used in this research is quantitative data analysis method and data analysis method using a path diagram with 6 dimensions of measurement namely, Economic Democracy represented by 3 variables (Production Democracy, Production Factor Democracy, Allocation and Consumption Democracy), Economic Suction Degrees, variables economic inequality, and poverty in Indonesia in 2008-2017.

Keywords: Economic democracy; degrees of suction of economy; level of inequality; poverty

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari beberapa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana sebagian dari daerah-daerah tersebut memiliki kekayaan sumberdaya alam dan sebagian lagi tidak. Daerah yang kaya dengan sumberdaya alam saat ini umumnya masih tertinggal dari daerah-daerah lain akibat kebijakan masa lalu yang cenderung memusatkan pembangunan di Pulau Jawa. Maka tidak heran jika di masa otonomi daerah ini, daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam berlomba-lomba mengejar ketertinggalan mereka dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang. Dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar berasal dari dana bagi hasil sumberdaya alam yang nilainya memang cukup besar. Kondisi ini berbeda dengan sebelum otonomi daerah, dimana hasil dari sumberdaya alam dikelola secara terpusat dan dialokasikan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, tanpa ada pembagian yang jelas antara daerah penghasil dan pemerintah pusat. Oleh karena itu wajar jika ada daerah penghasil sumberdaya alam hanya mendapatkan sebagian kecil atau tidak sebanding dengan apa yang telah daerah hasilkan.

Pembangunan yang dilakukan oleh daerah-daerah seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, namun kenyataannya masih ada beberapa daerah kaya sumberdaya alam yang masih bergelut dengan kemiskinan. Seharusnya dengan kekayaan yang dimiliki dan banyaknya pembangunan yang dilakukan, daerah yang kaya dengan sumberdaya alam memiliki kesempatan yang lebih besar dari daerah lain untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam pengelolaan dana dan pembangunan di daerah, khususnya daerah yang kaya dengan sumberdaya alam.

Di sisi lain Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dalam struktur ekonomi dan penerimaan negara, mayoritas masih mengandalkan pendapatan dari eksplorasi sumber daya alam (SDA) tersebut, yang sesungguhnya jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, maka dapat di prediksi perekonomian Indonesia akan terpuruk dan tidak berkelanjutan (*sustainable growth*) karena sifatnya yang non *Renewable Resources* (sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui).

Gambaran kuantitatif berikut ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada beberapa propinsi saat ini yang memiliki sumber daya alam (SDA) yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua. Dan Papua barat, Dimana kita telah mengetahui bahwa propinsi tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam menginjeksi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa dasa warsa terakhir ini.

Dengan PDRB ratusan triliun, daerah ini tumbuh sebagai daerah harapan masa depan Indonesia, namun disisi lain, adalah hal ironis dimana terlihat bahwa daerah ini juga ternyata juga masih relative terkebelakang baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan public, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang juga tinggi serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang belum memadai.

Disisi lain ada juga propinsi yang tidak berbasis sumber daya alam (non SDA) yaitu Propinsi selain Propinsi penghasil SDA tersebut diatas seperti DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI. Jogjakarta. Propinsi yang berada di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain, yang telah kita ketahui, ternyata telah tumbuh perekonomiannya dengan pesat, infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang memadai dan tingkat kemiskinan yang lebih kecil telah mengindikasikan bahwa kesejahteraan daerah yang berbasis non sumber daya alam ini relatif lebih baik dengan jumlah penduduk yang sangat besar daerah ini telah mampu menciptakan "nilai tambah" melalui sektor industri (termasuk *home industry*) yang mempunyai *multiplier effect* yang sangat besar.

METODE

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variable atau lebih. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kuantitatif dan metode analisis data menggunakan diagram jalur dengan 6 dimensi pengukuran yaitu, Demokrasi Ekonomi yang diwakili oleh 3 variabel (Demokrasi Produksi, Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi, Demokrasi

Alokasi dan Konsumsi), Derajat Penghisapan Ekonomi, variabel pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2017.

Penelitian mengambil lokasi di Adalah Indonesia dengan memberikan dummy varabel bagi provinsi penghasil SDA (Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan timur, Papua) dan propinsi bukan penghasil SDA (Adalah Propinsi Lain di Indonesia, selain Propinsi tersebut diatas. Waktu penelitian diperkirakan selama 3 bulan mulai dari penyusunan Proposal, Pengumpulan Data hingga Analisis Data dengan meneliti tentang Pengaruh Demokrasi Ekonomi dan Derajat Penghisapan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesenjangan dan Kemiskinan di Daerah Penghasil Sumber Daya Alam dan Daerah Non Sumber Daya Alam di Indonesia.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Pengujian terhadap asumsi klasik yaitu asumsi yang mendasari pelaksanaan regresi linier berganda supaya hasilnya dapat diandalkan. Menurut Gujarati (1999) terdapat tiga penyimpangan asumsi klasik yang dapat terjadi dalam menggunakan model regresi linier berganda yaitu multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Langkah terakhir adalah pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik terhadap regresi berganda. Untuk membuktikan hipotesis ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan atau kuat maka dilakukan uji F dan Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaruh demokrasi produksi, demokrasi pemilikan faktor produksi, demokrasi alokasi dan konsumsi, dan derajat penghisapan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk provinsi penghasil SDA

Tabel 1. Koefisien Regresi Provinsi SDA untuk Pertumbuhan Ekonomi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.901	.103		8.341	.000
UMR	6.529	.033	5.155	.662	.047
1 PAD_APB	13.618	.201	12.907	.811	.031
Rasio_Gini	50.189	.109	51.217	2.346	.022
DPE	-11.518	.328	-9.997	-.127	.043

a. Dependent Variable: Pert_Ekonomi

Berdasarkan dari tabulasi data-data diatas secara parsial variabel Demokrasi Produksi (X_1), Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Produksi (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Dalam tabel diatas tampak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,047 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Produksi (X_1) melalui Upah minimum Regional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_2 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,031 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3)

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_3 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,022 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_4 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,043 < 0,05$). Artinya pada variabel Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Dari hasil analisis keempat variabel yaitu variabel Demokrasi Produksi (X_1), Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1), maka dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y_1 = 6,529X_1 + 13,618X_2 + 50,189X_3 - 11,518X_4 + e$$

Tabel 2. Model Summary Regresi Provinsi SDA untuk Pertumbuhan Ekonomi

Model summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.825	.737	.034

a. Predictors: (Constant), DPE, UMR, Rasio_Gini, PAD_APBD

Dari output model 1 *summary*, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,825. Besarnya angka koefisien determinasi 0,825 adalah sama dengan 82,5 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa persamaan model struktur pertama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 82,5 %, sedangkan sisanya sebesar 17,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

Tabel 3. Hasil Anova regresi provinsi SDA untuk pertumbuhan ekonomi ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.034	4	1.714	8.355	.032 ^b
	Residual	.005	0	.003		
	Total	.042	4			

a. Dependent Variable: Pert_Ekonomi

b. Predictors: (Constant), DPE, UMR, Rasio_Gini, PAD_APBD

Sedangkan untuk Uji F atau Uji serempak pada model langsung struktur 1 dapat dilihat pada hasil data anova pada tabel 5.9. Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikansi output adalah sebesar 0,032 sedangkan nilai alpha yang digunakan adalah 0,05. Artinya variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Produksi, Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi, Demokrasi Alokasi dan Konsumsi, dan Derajat Penghisapan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan untuk Provinsi Penghasil SDA.

Tabel 4. Koefisien regresi provinsi SDA untuk tingkat kemiskinan Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.901	.103		8.266	.000
	UMR	-3.529	.023	-.577	-.548	.034
	PAD_APBD	-16.688	.548	-.182	-.771	.022
	Rasio_Gini	-20.099	.423	-.222	-2.346	.012
	DPE	9.088	.408	.109	.127	.047

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Berdasarkan dari tabulasi data-data diatas secara parsial variabel Demokrasi Produksi (X_1), Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Tingkat Kemiskinan (Y_2).

Pengaruh Demokrasi Produksi (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Dalam tabel diatas tampak bahwa hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Produksi (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model diketahui bahwa $X_1 - Y_2$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,034 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Produksi (X_1) melalui Upah minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2).

Pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model diketahui bahwa $X_2 - Y_2$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,022 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2).

Pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_3 - Y_2$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,012 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2).

Pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_4 - Y_2$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y_2), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,047 < 0,05$). Artinya pada variabel Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2).

Dari hasil analisis keempat variabel yaitu variabel Demokrasi Produksi (X_1), Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2), maka dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y_1 = -3,529X_1 - 16,688X_2 - 20,099X_3 + 9,088X_4 + e$$

Tabel 5. Model summary regresi provinsi SDA untuk Tingkat Kemiskinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.769	.801	.024

a. Predictors: (Constant), DPE, UMR, Rasio_Gini, PAD_APBDD

Dari output model 1 *summary*, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,769. Besarnya angka koefisien determinasi 0,769 adalah sama dengan 76,90 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa persamaan model berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 76,90%, sedangkan sisanya sebesar 23,10 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

Tabel 6. Hasil anova regresi provinsi SDA untuk Tingkat Kemiskinan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.024	4	1.714	7.833	.028 ^b
	Residual	.021	0	.003		
	Total	.036	4			

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), DPE, UMR, Rasio_Gini, PAD_APBD

Sedangkan untuk Uji F atau Uji serempak pada model langsung struktur 1 dapat dilihat pada hasil data anova pada tabel 5.12. Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikansi output adalah sebesar 0,028 sedangkan nilai alpha yang digunakan adalah 0,05. Artinya variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y_2).

Pengaruh demokrasi produksi, demokrasi pemilikan faktor produksi, demokrasi alokasi dan konsumsi, dan derajat penghisapan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk provinsi bukan penghasil SDA

Tabel 7. Koefisien regresi provinsi bukan SDA untuk pertumbuhan ekonomi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	42.831	.303		9.582	.000
UMR	1.689	.021	3.225	.631	.035
1 PAD_APBD	6.788	.201	12.907	.811	.029
Rasio_Gini	10.222	.109	51.217	2.346	.036
DPE	-3.700	.328	-5.876	-.127	.044

a. Dependent Variable: Pert_Ekonomi

Berdasarkan dari tabulasi data-data diatas secara parsial variabel Demokrasi Produksi (X_1), Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Produksi (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Dalam tabel diatas tampak bahwa hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Produksi (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_1 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,035 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Produksi (X_1) melalui Upah minimum Provinsi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_2 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,029 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 1 diketahui bahwa $X_3 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,036 < 0,05$). Artinya pada variabel Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pada tabel diatas tampak hasil analisis regresi atas pengaruh Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Berdasarkan output diatas hasil model koefisien pengaruh langsung model struktur 2 diketahui bahwa $X_4 - Y_1$ dalam uji parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 5% yaitu ($0,044 < 0,05$). Artinya pada variabel Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Dari hasil analisis keempat variabel yaitu variabel Demokrasi Produksi (X_1), Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (X_3) dan Derajat Penghisapan Ekonomi (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1), maka dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y_1 = 1,689X_1 + 6,788X_2 + 10,222X_3 - 3,700X_4 + e$$

Tabel 8. Model Summary Regresi Provinsi bukan SDA untuk Pertumbuhan Ekonomi

Model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.809 ^a	.654	.855	.021

a. Predictors: (Constant), DPE, UMR, Rasio_Gini, PAD_APBDD

Dari output model 1 *summary*, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,654. Besarnya angka koefisien determinasi 0,654 adalah sama dengan 65,40 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa persamaan model struktur pertama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 65,40 %, sedangkan sisanya sebesar 34,60% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

Tabel 9. hasil anova regresi provinsi bukan sda untuk pertumbuhan ekonomi

Anova^a

Model		sum of squares	df	mean square	f	sig.
1	regression	.024	28	1.714	12.001	.042 ^b
	residual	.012	0	.003		
	total	.072	28			

a. dependent variable: pert_ekonomi

b. predictors: (constant), dpe, umr, rasio_gini, pad_apbd

Sedangkan untuk Uji F atau Uji serempak pada model langsung struktur 1 dapat dilihat pada hasil data anova pada tabel 5.15. Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikansi output adalah sebesar 0,043 sedangkan nilai alpha yang digunakan adalah 0,05. Artinya variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Pengaruh demokrasi produksi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan daerah berbasis sumber daya alam

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai Koefisien variable X_1 terhadap Pertumbuhan ekonomi adalah positif 6,529, signifikan pada tingkat 0,047, keadaan ini menunjukkan bahwa variable demokrasi ekonomi yang diproxy dengan variable UMR memiliki pengaruh atas pertumbuhan ekonomi, jika saja UMR meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, karena dengan semakin tinggi UMR maka akan semakin banyak sisi demand dan supply yang diminta dan ditawarkan, akan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa baik dari sisi produsen maupun konsumen sebagai efek dari peningkatan Purchasing power parity (daya beli) masyarakat yang lebih tinggi.

Bagi sisi produsen kemampuan pemberian UMR yang tinggi dianggap sebagai prestasi dan kebanggaan karena dapat mempekerjakan tenaga kerjanya dengan lebih manusiawi, hal ini dianggap sebagai investasi sumber daya manusia tenaga kerja, bukan sebagai cost, ada motivasi tenaga kerja untuk loyal terhadap perusahaan, dengan demikian akan tumbuh motivasi seluruh tenaga kerja untuk bekerja dengan lebih profesional dan kedisiplinan yang tinggi agar reputasi perusahaan yang memberi UMR tinggi akan terjaga dengan baik.

Dari hasil analisis regresi linier berganda yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa demokrasi produksi (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel ini menunjukkan bahwa variabel demokrasi produksi yang diwakili oleh besaran Upah Minimum Regional (UMR) akan mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan jika saja upah minimum provinsi tersebut ditingkatkan bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia, maka kondisi ini dapat terjadi mengingat upah minimum Regional (UMR) langsung di konsumsi oleh pekerja dan keluarganya yang dipergunakan untuk keperluan belanja baik secara fisik maupun non fisik, jika saja UMR tinggi maka Personal income yang dibawa pulang kerumah dan siap untuk dibelanjakan juga tinggi, hal ini juga dapat mengindikasikan akan tercapai / tidak tercapai kesejahteraan dalam suatu keluarga.

Pengaruh demokrasi pemilikan faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan

Demokrasi Pemilikan Faktor Produksi (X_2) adalah kegiatan pembentukan produksi di daerah dan pembagian hasil produksi di daerah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat yang mempunyai dampak terhadap proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Variabel ini diwakili oleh rasio PAD/APBD. Dimana diketahui dari hasil analisis koefisien X_2 ini adalah sebesar 13,618 signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,031 dan - 16,688 terhadap Tingkat kemiskinan signifikan sebesar 0,022.

Untuk 5 provinsi di daerah penghasil SDA rasio perbandingan PAD terhadap APBD yang terendah adalah Propinsi Papua yaitu sebesar 0.034, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 0.221, untuk rata-rata rasio perbandingan PAD terhadap APBD di daerah penghasil SDA adalah sebesar 0.138.

Di daerah penghasil bukan penghasil SDA yang terendah rasio perbandingan PAD terhadap APBD adalah Propinsi Papua Barat, yaitu hanya sebesar 0.019, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Jawa Timur yang mencapai 0.315. Secara keseluruhan rata-rata rasio perbandingan PAD terhadap APBD di daerah bukan penghasil SDA dari tahun 2009 – 2018, adalah sebesar 0.182,- Dibandingkan dengan rasio perbandingan PAD terhadap APBD daerah penghasil SDA maka daerah bukan penghasil SDA memiliki rasio perbandingan PAD terhadap APBD yang lebih besar.

Proxy dari variabel tersebut di atas, dalam Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) diwakili oleh besaran rasio PAD/APBD. Hasil nilai estimasi variabel ini adalah sejalan dengan hipotesis yang telah dikemukakan yaitu bersifat negatif dan signifikan, ini menunjukkan adanya hubungan antara demokrasi pemilikan faktor produksi (DPFP) dengan kemiskinan yang terjadi di suatu daerah, jika demokrasi pemilikan faktor produksi dapat dilaksanakan dengan baik maka tingkat kemiskinan akan berkurang, yang ditunjukkan dengan besaran angka koefisien yang diperoleh, dalam hal ini jika rasio PAD/APBD terus meningkat maka angka kemiskinan di suatu daerah akan dapat berkurang.

Pengaruh demokrasi alokasi dan konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan

Demokrasi Alokasi dan Konsumsi adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut serta untuk menikmati hasil produksi daerah. Variabel ini diwakili oleh variabel rasio gini, nilai koefisien yang diperoleh oleh variabel ini adalah sebesar 50,189 terhadap Y_1 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,022 sedangkan koefisien terhadap Y_2 adalah sebesar - 20,099 signifikan pada tingkat 0,012.

Untuk 5 provinsi di daerah penghasil SDA rasio gini yang terendah adalah Propinsi Aceh yaitu sebesar 0.325, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Papua, yaitu sebesar 0.411, untuk rata-rata rasio gini di daerah penghasil SDA adalah sebesar 0.359.

Di daerah penghasil bukan penghasil SDA yang terendah rasio gini adalah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu hanya sebesar 0.293, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Yogyakarta yang mencapai 0.421. Secara keseluruhan rata-rata rasio gini di daerah bukan penghasil SDA dari tahun 2009 – 2018, adalah sebesar 0.362,- Dibandingkan dengan rasio gini daerah penghasil SDA maka daerah bukan penghasil SDA memiliki rasio gini yang lebih besar.

Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) dimaksudkan sebagai partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut serta untuk menikmati hasil produksi di daerah, variabel ini diwakili oleh variabel ketimpangan pendapatan.

Esensi pembangunan adalah tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, ujung tombak dari keadaan ini adalah terpenuhinya pendapatan baik secara perkapita maupun regional, karena dengan pendapatan regional yang tinggi, ini menunjukkan bahwa demokrasi alokasi dan konsumsi telah dapat dijalankan dengan baik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, ini berarti jika Pendapatan regional atau index gini semakin timpang atau semakin lebar maka tingkat kemiskinan juga akan semakin bertambah, sebaliknya jika Pendapatan regional semakin merata maka tingkat kemiskinan juga semakin mengecil.

Beberapa hasil penelitian terdahulu, telah menemukan bukti-bukti adanya ketimpangan pendapatan yang dapat ditelusuri pada teori klasik seperti Adam Smith, David Ricardo serta Marx yang berbicara tentang penentuan nilai dan harga barang yang kemudian melahirkan ketimpangan pembagian pendapatan fungsional yaitu ketimpangan yang terjadi diantara pemilik faktor-faktor produksi.

Hasil penelitian ini, menunjukkan Ketimpangan Pendapatan daerah sumber daya alam (SDA) selama periode tahun 2008 – 2017, rata-rata memiliki ketimpangan sebesar 0,77 sedangkan di daerah bukan sumber daya alam hanya memiliki ketimpangan sebesar 0,46, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kekayaan sumber daya alam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk ketimpangan regional, kondisi ini juga menunjukkan ternyata ketimpangan yang tinggi telah melahirkan tingkat kemiskinan yang juga tinggi sebaliknya ketimpangan yang rendah ternyata tingkat kemiskinan juga rendah.

Kenyataan tersebut diatas, diperkuat dengan hasil penelitian Tulus Tambunan, 2006, yang menjelaskan bahwa: Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia, dikatakan besar karena jika dua masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius, suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya, tumbangnya rezim orde baru di Indonesia yang digantikan dengan rezim orde reformasi bermuara pada persoalan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, jika saja saat orde baru rakyat Indonesia kondisi kesejahteraannya sangat baik, mungkinkah mahasiswa berdemonstrasi secara massive yang mengakibatkan Presiden Soeharto tumbang.

Pengaruh derajat penghisapan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan

Derajat Penghisapan Ekonomi adalah pengurangan konstanta terhadap rasio konsumsi/kapita yang dibagi dengan PDRB/kapita, dimana diperoleh nilai koefisien sebesar - 11,518 signifikan pada taraf 0,043 untuk variable Y_1 dan nilai koefisien sebesar 9,088 signifikan pada taraf 0,047 untuk variable Y_2 .

Untuk 5 provinsi di daerah penghasil SDA derajat penghisapan ekonomi yang terendah adalah Propinsi Aceh yaitu sebesar 0.58, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 0.87, untuk rata-rata derajat penghisapan ekonomi di daerah penghasil SDA adalah sebesar 0.74.

Di daerah penghasil bukan penghasil SDA yang memiliki derajat penghisapan ekonomi terendah adalah Propinsi Maluku, yaitu hanya sebesar 0.34, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi DKI Jakarta yang mencapai 0.85. Secara keseluruhan rata-rata derajat penghisapan ekonomi di daerah bukan penghasil SDA dari tahun 2009 – 2018, adalah sebesar 0.61 jika dibandingkan dengan derajat penghisapan ekonomi daerah penghasil SDA maka daerah bukan penghasil SDA memiliki derajat penghisapan ekonomi yang lebih kecil.

Semakin tinggi derajat penghisapan ekonomi di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya, sebaliknya semakin rendah derajat penghisapan ekonominya maka semakin rendah pula tingkat kemiskinannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di daerah penghasil sumber daya alam banyak sekali terdapat berbagai perusahaan atau Multi National Corporate yang bergerak

dibidang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, pertambangan baru bara, emas, nikel, perkebunan sawit dan lain-lain, sebagian besar perusahaan ini adalah perusahaan asing, dengan Ijin yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, Perusahaan asing ini dengan leluasa untuk terus mengolah sumber daya alam untuk dilakukan ekspor ke mancanegara, ini mengakibatkan di daerah hanya menjadi penonton, multiplier effect hanya terjadi pada penyerapan tenaga kerja lokal yang jumlahnya sangat kecil, mengingat sektor ini bersifat high-tech dan padat modal, kekayaan daerah melalui PDRB tergerus secara terus menerus dan berpotensi akan habis dalam jangka waktu tertentu karena non renewable resources, kekayaan sumber daya alam di daerah terus di ekspor dan di daerah menanggung segala resiko seperti kehancuran lingkungan baik di darat maupun di perairan.

Penelitian Mubyarto (2005) mengingatkan adanya Penjajahan kembali ekonomi Indonesia. Banyak daerah, terutama yang kaya akan sumber daya alam, dimasa orde baru (1966-1998) merasa “ dihisap kekayaannya “ oleh perusahaan asing, nilai dan tingkat penghisapan ini dapat ditaksir, salah satu cara menghitung atau menaksirnya adalah dengan membandingkan nilai Konsumsi per kapita terhadap PDRB per kapita, jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduknya, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat, dengan perkataan lain sebagian PDRB “ dikirimkan “ kembali kepada pemiliknya yaitu investor asing.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, harus mampu mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan sumber daya alam ini agar dapat dinikmati oleh rakyat setempat sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal 33. Demokrasi ekonomi semestinya memberikan porsi yang lebih besar bagi rakyat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, pengurangan angka kemiskinan hanya dapat terjadi jika derajat penghisapan ekonomi dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adapun besaran nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar

Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010 hingga akhir tahun 2018 menunjukkan hal yang menggembirakan, krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada kenyataannya tidak berdampak signifikan pada perekonomian nasional, permintaan domestik masih cukup kuat untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi walaupun terjadi perlambatan pada sisi eksternal, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 % (yoy) lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,2 % (yoy) pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor netto serta sektor industri yang tumbuh signifikan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera ditopang terutama oleh konsumsi pemerintah seiring dengan kenaikan TKDD. Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung moderat dan investasi melambat sejalan dengan prospek ekspor LN yang melambat karena harga komoditas yang rendah (CPO, timah, batubara dan kopi). Meski demikian, terdapat prospek peningkatan ekspor antardaerah untuk komoditas utama CPO sebagai dampak perluasan kebijakan B20 di pasar domestik. Dampak positif kebijakan B20 juga tercermin pada pertanian dan industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh meningkat. Sementara itu, pertambangan masih akan tumbuh terbatas karena penurunan alamiah *lifting* minyak bumi dan menurunnya kuota produksi batubara.

Untuk 5 propinsi di daerah penghasil SDA tingkat kemiskinan yang terendah adalah Propinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 6.55, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Papua, yaitu sebesar 30.83, untuk rata-rata tingkat kemiskinan di daerah penghasil SDA adalah sebesar 15.54.

Di daerah penghasil bukan penghasil SDA yang memiliki tingkat kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta, yaitu hanya sebesar 3.71, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi Papua Barat yang mencapai 27.93. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kemiskinan di daerah bukan penghasil SDA dari

tahun 2009 – 2018, adalah sebesar 11.68 jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah penghasil SDA maka daerah bukan penghasil SDA memiliki tingkat kemiskinan yang lebih kecil.

Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi dan jauh dari program-program pembangunan (yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga internasional). Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan dengan demikian menghindari kehidupan dalam kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Demokrasi produksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia.;

Demokrasi pemilikan faktor produksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia;

Demokrasi alokasi dan konsumsi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia;

Derajat penghisapan ekonomi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia;

Demokrasi produksi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia;

Demokrasi pemilikan faktor produksi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia;

Demokrasi alokasi dan konsumsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia

Derajat penghisapan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dan daerah bukan penghasil sumber daya alam (Non SDA) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Biro Pusat Statistik, Republik Indonesia, 2007.

Anonim, Biro Pusat Statistik, Republik Indonesia, 2011, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2010.

Anonim, LPEM, FEUI, 2004, Simulasi Penurunan Kemiskinan Di Indonesia.

Arbuckle, James, 1992. *Amos: Analysis of Moment Structure, User's Guide*, Dalam Amos 3:1 Philadelphia.

Archer, Robin, *Economic Democracy: The Politics of Feasible Socialism*, Clarendon Press.

Arief, Sritua, 2002, *Ekonomi Kerakyatan, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Muhammadiyah Press, Surakarta.

Arsyad, L, 1999, *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Bank Dunia, 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. World Bank.

Baswir, Revrison, 2002. *Ekonomi Kerakyatan*, BPFE UGM, Jogyakarta.

- Christensen, J. Arthus, 1992. *Populations and Sample*, New York, MC. Graw Hill Book Company.
- Dahl, Robert A, 1985, *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Akhmad Setiawan, Jakarta, Yayasan Obor.
- Dalkey, Norman C. (1969): *The Delphi Method: An Experimental Study of Group Opinion, prepared for United States Air Force Project Rand*, Santa Monica.
- Dalkey, N. C. & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi Method to the use of experts. *Management Science*, 9(3), 458 - 468.
- Fauzi, A, 2007, Economic Of Nature Non-Convexcity, Reorientasi Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Bagi Indonesia, orasi ilmiah Guru besar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institute Pertanian Bogor, Bogor tanggal 10 November 2007.
- Hader, Michael and Häder, Sabine (1995): Delphi und Kognitionspsychologie: EinZugang zur theoretischen Fundierung der Delphi-Methode, in: *ZUMA-Nachrichten*, vol. 37, 19. November 1995, p. 12.
- Hair, Josep F. Anderson, Tatham, 1995. *Multivariase Data Analysis With Readings*, 3rd Edition, New York, Mac Millan Publishing Company.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan, Rama dan M.G. Quibria, 2000. *Poverty and Patterns of Growth*, ERD Working Paper Series No. 18 Economic and Research Dept, August, Manila: Asian Development Bank.
- Hiatt, Steven, 2007. *A Game As Old As Empire*, San Fransisco, Berret, Koehler publisers, Inc.
- Ibrahim, Rstam, 2007, *Jurnal Hubungan Demokrasi dan Bisnis*.
- Jaya Azis, Iwan, 1993, *Jurnal Implementasi Demokrasi Ekonomi*, Yayasan Keluarga Bakti, Surabaya.
- Jhingan, M.L., 1990, *The Economics of Development and Planning*, Terjemahan Guritno. D, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kakwani, Nanak C, 1980, *Income In Equality and Poverty Method of Estimation and Policy Applications*, Published For The World Bank Oxford University Press.
- Khairullah, Malik Cahyadin, 2006. *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia, studi kasus Kabupaten Lahat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang* Vol 11 No 3
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP,
- Kuznetz, Simon, 1955. *Economic Growth and Incur in Equality*, American Economic Review.
- Kriegman, Orion, 1998, *The Potential for Economic Democracy n America*.
- Lewis, W. Arthur, 1954. *Economic Development With Unlimited Supplier of Labor*, Manchester School of Economic and Social Studies.
- Linstone, A & Murray Turloff, 1974, *The Delphi Method: Tecnique and Application*, Reading: Addison-Wesley.
- Mellor J.W. 2000. *Faster More Equitable Growth: The Relations Between Growth in Agriculture and Poverty Reductions*, Diskussion Paper No. 70, Harvard Instituse for International Development.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, BPFE UGM, Jogyakarta.
- Mercuse, Peter, 2004. *Jurnal, Sustainability is Not Enough*, Springer, Nederland.
- Perkins, John, 2006. *Confession Of an Economics Hit Man*, London, Penguins Books, Ltd.
-

-
- Prayitno, Irwan, 2009, *Jurnal Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*.
- Osborne, David and Ted Goebler, 1993. *Reinventing Government How The Enterpreneural Spirit is Transforming The Public Sector*, Pinguins books, New York.
- Rais, Amien, 2008. *Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*, PPSK Press Jogjakarta.
- Ranis, G dan Fei J.G, 1968. *Assistent and Economic Development Comment*, American Economic Review LVIII.
- Ravallion, Martin. 2001. *Poverty Comparisons*. World Bank.
- Ravallion, M dan Gaurav Dait (1996). *How Important to India's Poor, is the Sectoral Compositions on Growth*, Wold Bank Economic Review, 10.
- Rowe, G. & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis. *International Journal of Forecasting*, 15(4), 353 - 375.
- Saleh, Samsubar, 2002, *Jurnal Kemiskinan Di Indonesia*.
- Sasono, Adi, 2008. *Majalah Reforman*, Publik Survei, Volume II, Jakarta.
- Santoso, Budi, 2008. *Majalah Reform*, Rubrik Survei, Volume II, Jakarta.
- Santosa, Awan, 2009. *Formulasi Indeks Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, Thesis Magister Sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM, Jogjakarta.
- Sayogjo, 1985. *Rural Poverty and Effort for its Alleviations in Indonesia*, A Sociological Review WCARRD.
- Sen, amartya K, 1976. *Poverty: And Ordinal Approach to Measurement*, Econometrica.
- Skumolski, and Hartman, 2007. The Delphi Method for Graduate Researce, *Journal of Information and Techmology Education, Canada*.
- Sugiyono, 2003. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Suandi Hamid, Eddy, 2009. *Rekonstruksi Sistem Ekonomi Untuk Mendukung Daya Saing Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global*, Makalah Kongres ISEI XVII Bukitinggi, Sumatera Barat.
- Syafrizal, 2000. *Ketimpangan Ekonomi Daerah, Tendensi, Penyebab dan Kebijakan Penanggulangan*, Makalah dalam kongres XIV ISEI 21-23 April, Makassar
- Tambunan, Tulus, 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Williamson, 1996, *Bologna and Emilia Romagna: A Model of Economic Democracy*, diakses di internet tanggal 12/8/07 jam 09.49 WIB.